

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN
MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) PADA PEMILIK
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
DI KABUPATEN KAMPAR**

Oleh:

Zulfi Arsad

Pembimbing: Yessi Mutia dan Azhari S

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : zulfiarsad7@gmail.com

*Analysis Of Factors Affecting The Consciousness Have A Taxpayers Identification
Number (Tin) Owner In Micro, Small And
Medium Enterprises In The District Kampar*

ABSTRACT

This research aims to know the influence of needs, convenience, sanctions, and the perception of the consciousness have a Taxpayer Identification Number (TIN) In The District Kampar. This study used a simple technique accidental sampling with a sample of 100 people who have been determined based on those results slovin formula. Data collection techniques in this study is a questionnaire , the data is processed using Logistic Regression with SPSS version 20. The results showed that the variable needs to have a TIN, convenience variables have a TIN, and tax penalties variables affect the consciousness have a Taxpayer Identification Number (TIN) while the variable perception of taxation does not affect the consciousness have a Taxpayer Identification Number (TIN). The coefficient of determination (R²) value of R Square of 0.446 indicates that awareness of the WP in Kampar regency have a TIN is affected by the variable needs, ease, perception WP and tax penalties amounting to 44.6%. While about 55.4% influenced by other variables

Keyword : Awareness have a TIN, needs to have a TIN, the convenience of having a TIN, sanctions taxation, taxation perception.

PENDAHULUAN

Setiap orang seperti tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), wajib mendaftarkan diri di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha,

tempat tinggal, atau tempat kedudukan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lama satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Pada kenyataannya, tidak mudah mengharapkan wajib pajak (WP) dengan suka rela mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Banyak faktor yang melatarbelakangi WP untuk mau atau sadar memiliki NPWP.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya (Mardiasmo, 2009).

Industri kecil dan menengah merupakan salah satu bentuk industri padat karya, karena kegiatan produksi yang diterapkan usaha kecil dan menengah dilaksanakan secara manual, sehingga cukup banyak menyerap tenaga kerja. Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi.

Jenis usaha kecil dan menengah yang terdapat di kabupaten Kampar terdiri dari industri makanan dan minuman, industri barang dari kayu, industri percetakan dan penerbitan, industri kimia, industri perabot rumah tangga dan industri pengolahan karet. Berikut ini tabel 1 perkembangan industri kecil di Kabupaten Kampar dan kepemilikan NPWP oleh UMKM tahun 2010-2014:

Tabel 1
Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah yang Telah Memiliki dan Belum Memiliki NPWP di Kabupaten Kampar Tahun 2010-2014

Tahun	Jumlah UKM	Memiliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP	Kepemilikan NPWP (%)
2010	263	164	99	62,36%
2011	378	182	196	48,15%
2012	279	173	106	62,01%
2013	261	154	107	59,00%
2014	291	146	145	50,17%

Sumber : *Disperindag Kabupaten Kampar, 2016*

Dari Tabel 1 Partisipasi pemilik UMKM di Kabupaten Kampar dalam kepemilikan NPWP masih rendah, hal ini dilihat dari rendahnya kepemilikan NPWP yang berkisar antara 50,17% hingga 62,36%. Rendahnya kepemilikan

NPWP pada pemilik UMKM di Kabupaten Kampar karena masih rendahnya tingkat kesadaran UMKM dalam memiliki NPWP contohnya saja masih banyak pemilik usaha yang tidak mengetahui manfaat memiliki NPWP serta sanksi yang akan diterima jika usaha mereka tidak memiliki NPWP.

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia yang dapat memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara (Suardika, 2007:74).

Wajib pajak akan membutuhkan NPWP dalam membayar kewajibannya untuk membayar pajak dimana NPWP merupakan salah satu syarat wajib yang harus dimiliki wajib pajak dalam administrasi perpajakannya. Selain itu NPWP dibutuhkan untuk menghindari pengenaan tarif pajak yang tinggi karena sanksi yang dikenakan bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Kebutuhan Wajib Pajak yang berbagai macam atas Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memiliki Nomor Pokok Wajib pajak.

Kemudahan merupakan sesuatu hal yang membuat kita menjadi tidak sulit dalam melakukan sesuatu. Dalam hal memiliki NPWP ini wajib pajak diberikan kemudahan dalam urusan perpajakannya dan dalam pembuatan NPWP itu sendiri.

Dengan adanya berbagai kemudahan yang diberikan dalam memiliki NPWP oleh Direktorat Jendral Pajak tersebut akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk memiliki NPWP.

Faktor selanjutnya adalah sanksi pajak, menurut kamus Bahasa Indonesia (Mahirjanto, 2009: 285), sanksi adalah hukuman, tindakan paksaan atas pelanggaran. Dalam arti lainnya, sanksi dikatakan sebagai imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum. Menurut UU KUP, setiap orang yang telah memenuhi syarat subyektif dan objektif diwajibkan untuk memiliki NPWP, dan apabila dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.

Persepsi merupakan pandangan seseorang terhadap sesuatu yang akan membuat respon bagaimana dan dengan apa seseorang akan bertindak. Perilaku individu seringkali didasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan. Persepsi yang baik dari seorang wajib pajak dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Bestari (2015) yang meneliti tentang Pengaruh Kebutuhan Memiliki NPWP, Kemudahan Dalam Perpajakan, Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Studi Empiris Pada Pengusaha UMKM di Kota Pekanbaru). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu pertama, penelitian ini menambahkan satu variabel, yaitu sanksi pajak. Kedua, lokasi penelitian

dimana penelitian ini meneliti di Kabupaten Kampar selain itu penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2013 maka penelitian ini dilakukan pada tahun 2015.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh pengaruh faktor-faktor di atas yakni kebutuhan, kemudahan, sanksi, dan persepsi terhadap kesadaran WP OP pemilik UKM untuk memiliki NPWP. Studi dilakukan terhadap WP OP pemilik UKM di Kabupaten Kampar. Aspek sikap dan perilaku mereka terhadap regulasi perpajakan, khususnya kesadaran mereka untuk memiliki NPWP menarik untuk diteliti sebab para pemilik UKM atau pengusaha kecil memiliki potensi yang besar bagi penerimaan negara. Faktor-faktor kesadaran yang mencerminkan aspek sikap dan perilaku tersebut di atas dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun dan implementasi suatu strategi yang mampu mendorong para pengusaha UKM memiliki NPWP.

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Usaha Kecil dan Menengah

Kegiatan usahanya tidak terorganisir secara baik dan umumnya mereka tidak mempunyai izin usaha. Pola kegiatannya tidak teratur, kebijaksanaan pemerintah ataupun badan usaha lainnya untuk membantu pengusaha kecil masih kurang, teknologi yang dipakai masih sederhana, modal serta perputaran usaha relatif kecil, demikian pula skala organisasinya juga kecil, tidak memerlukan pendidikan formal, pendidikannya diperoleh dari pengalaman sambil kerja.

Kesadaran

Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Muliari, 2011).

Kesadaran merupakan hal yang penting untuk mendorong kemauan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Perlu adanya kerelaan dan keikhlasan untuk membayar pajak yang telah menjadi tanggungannya. Kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada Wajib Pajak tersebut akan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan.

Nomor Pokok Wajib Pajak

Pasal 1 angka 6 Undang-undang KUP (Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. DJP dapat menerbitkan NPWP secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Kebutuhan atas NPWP

Kebutuhan adalah salah satu aspek psikologis yang menggerakkan makhluk hidup dalam aktivitas-aktivitasnya dan menjadi dasar (alasan) bagi setiap individu untuk berusaha. Kebutuhan menurut kamus Bahasa Indonesia berarti memerlukan (Mahirjanto, 2009). Kebutuhan memiliki NPWP bagi WP OP dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana WP OP tersebut sangat memerlukan NPWP dan faktor kebutuhan bagi WP sendiri harus berkaitan dengan manfaat dari memiliki NPWP.

Kemudahan dalam Perpajakan

Kemudahan menurut kamus Bahasa Indonesia berarti mudah atau tidak sulit (Mahirjanto, 2009). Kemudahan memiliki NPWP dapat diartikan bahwa WP tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan dan menghapus NPWP maupun menjalankan hak serta kewajiban perpajakan setelah memilikinya. Terkait dengan kemudahan dan dalam rangka meraih kepercayaan masyarakat, DJP melakukan program modernisasi perpajakan secara komprehensif yang meliputi modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, modernisasi Organisasi dan Sistem Informasi dan modernisasi Kualitas Sumber Daya Manusia.

Sanksi Pajak

Menurut kamus Bahasa Indonesia (Mahirjanto, 2009), sanksi adalah hukuman, tindakan paksaan atas pelanggaran. Dalam arti lainnya, sanksi dikatakan sebagai imbalan negatif, berupa pembebanan atau

penderitaan yang ditentukan dalam hukum. Suryadi (2006) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh dimensi pemeriksaan pajak, penegakan hukum dan kompensasi pajak. Tujuan utama dalam melakukan suatu pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Apabila penegakan hukum dapat memberikan kepastian hukum maka wajib pajak akan taat dan disiplin dalam membayar pajak.

Persepsi Wajib Pajak

Pengertian persepsi dalam sistem perpajakan adalah kesan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap sistem pembayaran pajak. Persepsi yang positif akan mendorong wajib pajak lebih memiliki kemauan dalam membayar pajak, sedangkan persepsi yang negatif akan berdampak sebaliknya. Modernisasi layanan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dapat mempermudah cara pembayaran dan pelaporan pajak (Rahmawati, 2011).

Pengaruh Kebutuhan terhadap Kesadaran Memiliki NPWP

Kebutuhan merupakan sesuatu yang sangat kita perlukan dalam memenuhi kehidupan. Wajib pajak akan membutuhkan NPWP dalam membayar kewajibannya untuk membayar pajak dimana NPWP merupakan salah satu syarat wajib yang harus dimiliki wajib pajak dalam administrasi perpajakannya. Selain itu NPWP dibutuhkan untuk menghindari pengenaan tarif pajak yang tinggi karena sanksi yang dikenakan bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Kebutuhan Wajib Pajak yang berbagai macam

atas Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Semakin tinggi kebutuhan atas kepemilikan NPWP maka tingkat kepemilikan NPWP akan semakin tinggi pula. Berdasarkan uraian diatas, maka dibuatlah hipotesis sebagai berikut:

H1: Diduga kebutuhan memiliki NPWP berpengaruh terhadap kesadaran memiliki NPWP.

Pengaruh Kemudahan terhadap Kesadaran Memiliki NPWP

Kemudahan merupakan sesuatu hal yang membuat kita menjadi tidak sulit dalam melakukan sesuatu. Dalam hal ini dalam memiliki NPWP wajib pajak diberikan kemudahan dalam urusan perpajakannya dan dalam pembuatan NPWP itu sendiri. Dengan adanya berbagai kemudahan yang diberikan dalam memiliki NPWP oleh Direktorat Jendral Pajak tersebut akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk memiliki NPWP. Semakin tinggi faktor kemudahan dalam urusan perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepemilikan NPWP. Berdasarkan uraian diatas, maka dibuatlah hipotesis sebagai berikut:

H2: Diduga kemudahan dalam Perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran memiliki NPWP.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kesadaran Memiliki NPWP

Suryadi (2006) menjelaskan Kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh dimensi pemeriksaan pajak, penegakan hukum dan kompensasi pajak. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya. Apabila penegakan hukum dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum maka wajib pajak akan taat, patuh dan disiplin dalam membayar pajak. Dengan penegakan hukum yang jelas dan tegas terutama penerapan sanksi akan berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri memiliki NPWP maupun dalam hal perpajakan lainnya. Semakin tinggi ketegasan sanksi dalam urusan perpajakan maka semakin tinggi tingkat kesadaran memiliki NPWP.

Berdasarkan uraian diatas, maka dibuatlah hipotesis sebagai berikut:

H3: Diduga ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran memiliki NPWP.

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak terhadap Kesadaran Memiliki NPWP

Persepsi atas pajak merupakan kesan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap sistem pembayaran pajak. Persepsi yang positif akan membuat orang lebih memiliki kesadaran dalam membayar pajak, sedangkan persepsi yang negatif akan berdampak sebaliknya. Semakin tinggi persepsi yang baik oleh wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kesadaran memiliki NPWP. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4: Diduga persepsi Wajib Pajak berpengaruh terhadap kesadaran memiliki NPWP

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan terhadap pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Kampar. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah

pemilik UMKM di Kabupaten Kampar. Populasi pemilik UMKM di Kabupaten Kampar pada tahun 2014 adalah sebanyak 291 unit usaha. Penelitian ini dalam mengambil sampel menggunakan metode *accidental sampling*. Dalam hal tersebut sampel yang diperoleh dengan menggunakan rumus solvin sebanyak 75 orang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepemilikan NPWP. Kepemilikan NPWP adalah apa saja alasan seorang pemilik UMKM untuk memiliki NPWP. Kesadaran merupakan unsur dalam manusia yang dapat memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas.

Setiap pertanyaan tersebut memiliki 5 (lima) alternative jawaban dan masing-masing jawaban diberi skor sesuai skala Likert yaitu : SS= Sangat Setuju (skor 5), S= Setuju (skor 4), RR = Ragu-ragu (skor 3), TS= Tidak Setuju (skor 2) dan STS = Sangat Tidak Setuju (skor 1).

Variabel Independen

Kebutuhan

Kebutuhan memiliki NPWP bagi WP OP dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana WP OP tersebut sangat memerlukan NPWP dan faktor kebutuhan bagi WP sendiri harus berkaitan dengan manfaat dari memiliki NPWP.

Kemudahan dalam Perpajakan

Kemudahan memiliki NPWP dapat diartikan bahwa WP tidak

mengalami kesulitan untuk mendapatkan dan menghapus NPWP maupun menjalankan hak serta kewajiban perpajakan setelah memilikinya.

Sanksi Pajak

Sanksi adalah hukuman, tindakan paksaan atas pelanggaran. Dalam arti lainnya, sanksi dikatakan sebagai imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum. Faktor sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku bagi WP yang ber-penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tetapi tidak memiliki NPWP adalah sudah jelas yakni sanksi pidana dan/atau sanksi administrasi.

Persepsi Manfaat Pajak

Persepsi adalah sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera, maka institusi perpajakan harus meningkatkan citranya dengan berbagai macam tindakan.

Metode Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini memberikan gambaran mengenai suatu data berupa nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum.

2. Pengujian Kualitas Data

Uji Reliabilitas

Pengukuran reliabilitas penelitian ini dilakukan dengan cara *One Shot* atau pengukuran sekali saja. Pengukuran *one Shot* hanya sekali dilakukan dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur

korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α).

Uji Validitas

Uji validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Apabila dari tampilan output SPSS menunjukkan bahwa korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang signifikan, dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid.

Uji Normalitas

Normalitas dapat diuji dengan berbagai cara, diantaranya dengan normal probability plot yaitu membandingkan plot nilai residual dari data actual dengan plot distribusi normal. Jika *plotting* data actual terletak pada garis diagonal tersebut atau mendekatinya, berarti data actual tersebut berdistribusikan normal.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Nilai *cut off* yang umum dipakai adalah *Tolerance* 0,10 atau = nilai VIF di atas 10.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara untuk mengetahui ada

atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dan residualnya (SRESID).

Uji Regresi Berganda

Uji Regresi Linier Berganda digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap independen adalah persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y : Kesadaran memiliki NPWP

X1 : Kebutuhan

X2 : Kemudahan

X3 : Sanksi

X4 : Persepsi

a : Konstanta

b1 : Slope regresi atau koefisien regresi dari X1

b2 : Slope regresi atau koefisien regresi dari X2

e : Kesalahan residual (error term)

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Uji ini dilakukan dengan melihat besarnya nilai koefisien determinasi R² yang merupakan besaran non negatif.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji signifikansi parameter individual digunakan untuk mengetahui atau mengukur pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis dilakukan dengan melihat tabel *coefficients* pada output SPSS. Dasar pengambilan keputusannya adalah Apabila signifikan bila $r \text{ value} < \alpha$

(0,05) sehingga menerima H1, sedangkan tidak signifikan bila $r \text{ value} > \alpha(0,05)$ sehingga menolak H1.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengembalian Kuisioner

Kuisioner diberikan kepada 80 orang pemilik UMKM di Kabupaten Kampar. Masing-masing pemilik usaha diberikan satu kuisioner. Jumlah kuisioner yang diisi dan dikembalikan sebanyak 75 buah dengan tingkat respon 93,75%. Tingkat pengembalian kuisioner dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Jumlah Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuisioner

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Kuisioner yang disebar	80	100%
Kuisioner yang tidak kembali	(5)	6,25
Kuisioner yang tidak dapat dianalisis	(-)	-
Kuisioner yang dapat dianalisis	75	93,75

Sumber : Data Olahan, 2016

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Untuk melihat hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran	75	.00	1.00	.7467	.43785
Kebutuhan	75	3.29	4.86	3.9999	.35367
Kemudahan	75	2.83	4.83	3.9023	.39751
Persepsi	75	2.75	5.00	4.0500	.48976
Sanksi	75	3.00	5.00	4.0833	.53482
Valid N (listwise)	75				

Sumber : Data Olahan, 2016

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa untuk variabel kesadaran wajib pajak nilai maksimum adalah 1 dan nilai

minimum 0. Untuk variabel kebutuhan nilai maksimum adalah 4,86 dan nilai minimum 3,29. Variabel kemudahan, nilai maksimum adalah 4,83 dan nilai minimum 2,83 sementara variabel persepsi pajak nilai maksimum adalah 5 dan nilai minimum 2,75. Selanjutnya variabel sanksi pajak nilai maksimum adalah 5 dan nilai minimum 3.

Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor butir dengan skor total. Untuk mengetahui apakah item yang diuji valid atau tidak, hasil korelasi dibandingkan dengan angka titik tabel korelasi dengan taraf signifikansi 1% atau 5%. Adapun variabel yang digunakan untuk melihat valid atau tidaknya sebagai berikut:

1. Variabel Penerapan Kebutuhan Wajib Pajak

Untuk melihat r hitung dan r tabel dari variabel kebutuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Variabel Kebutuhan WP

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0.336	0,182	Valid
2	0.420	0,182	Valid
3	0.487	0,182	Valid
4	0.297	0,182	Valid
5	0.433	0,182	Valid
6	0.224	0,182	Valid
7	0.403	0,182	Valid

Sumber :Data Olahan, 2016

2. Variabel Kemudahan

Untuk melihat r hitung dan r tabel dari variabel kemudahan dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Validitas Variabel Kemudahan

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0.303	0,182	Valid
2	0.427	0,182	Valid
3	0.447	0,182	Valid
4	0.375	0,182	Valid
5	0.394	0,182	Valid
6	0.548	0,182	Valid

Sumber :Data Olahan, 2016

3. Variabel Penerapan Persepsi Pajak

Untuk melihat r hitung dan r tabel dari variabel persepsi pajak dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Validitas Variabel Persepsi Pajak

Pertanyaan	r hitung	r table	Keterangan
1	0.414	0,182	Valid
2	0.391	0,182	Valid
3	0.674	0,182	Valid
4	0.375	0,182	Valid

Sumber :Data Olahan, 2016

4. Variabel Sanksi Pajak

Untuk melihat r hitung dan r tabel dari variabel sanksi pajak dapat dilihat pada tabel 7 berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak

Pertanyaan	r hitung	r table	Keterangan
1	0.531	0,182	Valid
2	0.790	0,182	Valid
3	0.822	0,182	Valid
4	0.589	0,182	Valid

Sumber :Data Olahan, 2016

Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil analisis dengan program SPSS didapat hasil pengujian reliabilitas pada tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Alpha Cronbach	Alpha (α)
Kebutuhan WP	0,751	0,600
Kemudahan	0,660	0,600

Persepsi WP	0,670	0,600
Sanksi Pajak	0,843	0,600

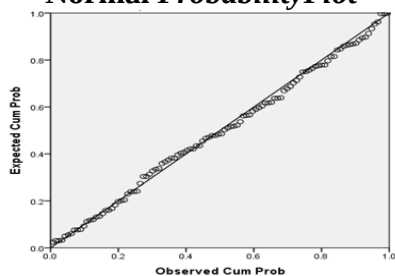
Sumber :Data Olahan, 2016

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas data untuk setiap variabel, diperoleh hasil lebih besar dari 0,6 yang berarti bahwa data tersebut reliabel.

Uji Normalitas

Untuk melihat apakah normalitas rata-rata jawaban responden yang menjadi data dalam penelitian ini dapat dilihat dari *normal probability plot*. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut :

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas -Grafik
Normal ProbabilityPlot



Sumber :Data Olahan, 2016

Gambar 2 diatas menunjukkan titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal secara merata, maka disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Uji Multikoleniaritas

Pengujian multikolinieritas dilaksanakan dengan menggunakan VIF dan *Tolerance*. Uji multikoleniaritas dihitung melalui program SPSS dan hasilnya nilai VIF (Variance Inflation Factor) yang

dapat dilihat pada tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9
Hasil Pengujian Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kebutuhan	0.837	1.19	Tidak terjadi multikoli ieritas
Kemudahan	0.857	1.16	
Persepsi	0.722	1.38	
Sanksi	0.847	1.18	

Sumber : Data Olahan, 2016

Berdasarkan nilai pada tabel 9 untuk setiap variabel independen nilai *tolerancenya* $> 0,1$ dan nilai *VIF* < 10 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak mengalami gangguan multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Hasil pengujian autokorelasi dari penelitian ini dapat dilihat dari tabel 10 berikut ini:

Tabel 10
Hasil Pengujian Autokorelasi

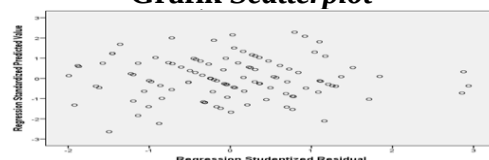
Deskriptif	Nilai Durbin Watson	Keterangan
N=75 $\alpha = 0,05$	1,484	Tidak Terjadi autokorelasi

Sumber :Data Olahan, 2016

Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi terjadi heteroskedastisitas menggunakan grafik *scatterplot* yang disajikan pada gambar 2 berikut ini:

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas:
Grafik Scatterplot



Sumber :Data Olahan, 2016

Dari gambar uji heteroskedastisitas, terlihat sebaran

data dan tidak tampak adanya suatu pola tertentu pada sebaran data tersebut. Maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Koefisien Determinan

Persamaan dalam penelitian ini menggunakan variabel independen lebih dari satu, maka nilai koefisien determinasi yang digunakan adalah *Adjusted R Square*. Tingkat koefisien determinasi yang diperoleh adalah sebesar Adj. $R^2 = 0,446$. Hal ini berarti kesadaran WP di Kabupaten Kampar dalam memiliki NPWP dipengaruhi oleh variabel kebutuhan, kemudahan, persepsi WP dan sanksi pajak sebesar 44,6%. Sementara sekitar 55,4% dipengaruhi oleh variabel lain. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel kesadaran WP dipengaruhi kebutuhan, kemudahan, persepsi WP dan sanksi pajak.

Uji Regresi Berganda

Dalam hal ini, hasil pengujian statistik regresi linier berganda disajikan dalam tabel 11 sebagai berikut:

Tabel 11
Hasil Uji Statistik T(T-Test)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.665	.688		.966	.337
Kebutuhan	.271	.150	-.219	2.805	.003
Kemudahan	.366	.132	.332	2.764	.007
Persepsi	.128	.117	-.144	1.099	.276
Sanksi	.064	.099	.078	2.647	.020

Sumber : Data Olahan, 2016

Dari tabel 11 diatas, didapat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,665 + 0,271 X_1 + 0,366X_2 + 0,128X_3 + 0,064X_4$$

Hasil statistik uji t diatas menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,805 >$

$1,991$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,003$ yang lebih kecil dari α sebesar $0,05$. Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya adalah H_a diterima dan H_o ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kebutuhanWP memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran WP dalam memiliki NPWP. Hal ini berarti semakin tinggi kebutuhan WP terhadap NPWP, maka akan meningkatkan kesadaran WP dalam memiliki NPWP. Sehingga hipotesis pertama (H_1) diterima.

Diterimanya hipotesis ini disebabkan kebutuhan wajib pajakterhadap NPWP memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesadaran WP dalam memiliki NPWP. Wajib pajak akan membutuhkan NPWP dalam membayar kewajibannya untuk membayar pajak dimana NPWP merupakan salah satu syarat wajib yang harus dimiliki wajib pajak dalam administrasi perpajakannya. Selain itu NPWP dibutuhkan untuk menghindari pengenaan tarif pajak yang tinggi karena sanksi yang dikenakan bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP.

Hasil statistik uji t diatas menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,764 > 1,991$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,007$ yang lebih kecil dari α sebesar $0,05$. Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya adalah H_a diterima dan H_o ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kemudahan dalam memiliki NPWP memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran WP dalam memiliki NPWP. Hal ini berarti semakin mudah dalam memiliki NPWP terhadap NPWP, maka akan meningkatkan kesadaran WP dalam

memiliki NPWP. Sehingga hipotesis kedua (H_2) diterima.

Kemudahan merupakan sesuatu hal yang membuat kita menjadi tidak sulit dalam melakukan sesuatu. Dalam hal ini dalam memiliki NPWP wajib pajak diberikan kemudahan dalam urusan perpajakannya dan dalam pembuatan NPWP itu sendiri. Semakin tinggi faktor kemudahan dalam urusan perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepemilikan NPWP

Hasil statistik uji t diatas menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $1,099 < 1,991$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,276 yang lebih besar dari α sebesar 0,05. Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya adalah H_a ditolak dan H_o diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa persepsi WP tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran WP dalam memiliki NPWP. Hal ini berarti persepsi WP terhadap NPWP tidak akan meningkatkan kesadaran WP dalam memiliki NPWP. Sehingga hipotesis ketiga (H_3) ditolak.

Persepsi atas pajak merupakan kesan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap sistem pembayaran pajak. Persepsi yang positif akan membuat orang lebih memiliki kemauan dalam membayar pajak, sedangkan persepsi yang negatif akan berdampak sebaliknya. Modernisasi layanan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dapat mempermudah cara pembayaran dan pelaporan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga sudah membuat situs yang mempermudah dalam mengakses peraturan dan informasi perpajakan untuk membayar pajak, diantaranya melalui *e-banking*, *e-SPT*, dan *e-filing*.

Hasil statistik uji t diatas menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,647 > 1,991$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,020 yang lebih kecil dari α sebesar 0,05. Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya adalah H_a diterima dan H_o ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran WP dalam memiliki NPWP. Hal ini berarti semakin tinggi sanksi pajak, maka akan meningkatkan kesadaran WP dalam memiliki NPWP. Sehingga hipotesis keempat (H_4) diterima.

Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Apabila penegakan hukum dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum maka wajib pajak akan taat, patuh dan disiplin dalam membayar pajak. Dengan adanya suatu penegakan hukum yang jelas, adil, tegas dan bertanggung jawab terutama penerapan sanksi akan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam mengukuhkan diri sebagai Pengusaha kena pajak.

SIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN DAN IMPILKASI

Simpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Kebutuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran memiliki NPWP pemilik UMKM di Kabupaten Kampar. Maka semakin tinggi kebutuhan wajib pajak terhadap NPWP maka akan semakin tinggi pula kesadaran WP untuk memiliki NPWP.
2. Kemudahan mengurus NPWP memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap kesadaran memiliki NPWP pemilik UMKM di Kabupaten Kampar. Maka semakin mudah wajib pajak dalam mengurus NPWP maka akan semakin tinggi pula kesadaran WP untuk memiliki NPWP.

3. Persepsi wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran memiliki NPWP pemilik UMKM di Kabupaten Kampar. Meskipun persepsi wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kesadaran WP untuk memiliki NPWP, namun tetap perlu upaya agar WP memiliki persepsi yang baik tentang manfaat memiliki NPWP.
4. Saksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran memiliki NPWP pemilik UMKM di Kabupaten Kampar. Maka semakin tinggi sanksi pajak maka akan semakin tinggi pula kesadaran WP untuk memiliki NPWP.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian, antara lain :

1. Dalam penelitian ini, penggunaan kuisioner sebagian besar masih menggunakan kuisioner yang dipakai peneliti sebelumnya, sehingga kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam pengukurannya karena belum tentu menggambarkan keadaan yang sama pada objek peneliti sebelumnya.
2. Adanya keterbatasan waktu sehingga responden meminta kuisionernya ditinggalkan yang berdampak pada peneliti tidak bisa mendampingi responden pada saat

menjawab. Akibatnya jawaban yang diberikan belum tentu menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel kemudahan, kebutuhan, persepsi dan sanksi pajak sedangkan masih banyak variabel lain yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP).

Saran

Dari hasil penelitian ini dapat diberi saran kepada peneliti selanjutnya bahwa :

- 1) Bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan pengujian dengan menambahkan variabel lain seperti sarana dan prasarana, partisipasi, dukungan teknologi informasi dan lain sebagainya.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya hendaknya membuat kuisioner yang baru dan disesuaikan dengan kondisi daerah yang diteliti sehingga dapat menggambarkan permasalahan yang sebenarnya.

Implikasi Penelitian

Melalui pengujian dan analisisnya, hasil penelitian ini memiliki implikasi berupa:

1. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap NPWP dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik UMKM di Kabupaten Kampar.
2. Adanya kemudahan dalam mengurus NPWP maka akan meningkatkan kesadaran WP pemilik UMKM di Kabupaten Kampar untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Pemberian sanksi yang tegas terhadap pemilik UMKM di Kabupaten Kampar yang belum

memiliki NPWP dapat meningkatkan kesadaran WP untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

4. Adanya persepsi pemilik UMKM di Kabupaten Kampar yang positif terhadap pelayanan perpajakan dapat meningkatkan kesadaran WP untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

DAFTAR PUSTAKA

- Bestari, Lega, 2015, *Pengaruh Kebutuhan Memiliki NPWP, Kemudahan Dalam Perpajakan, Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Studi Empiris Pada Pengusaha Umkm Di Kota Pekanbaru)*, Jom. Fekon Vol.2 No.1 Februari 2015
- Ghozali, Imam, 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Ketujuh. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*. Universitas Diponegoro
- Mahirjanto, Bambang, 2009, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, Penerbit Terbit Terang Surabaya.
- Mardiasmo., 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI.of Accounting and Economic. Vol. 43
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2011. *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depansar Timur*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Volume 2.
- Rahmawaty, dkk, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Usaha Warung Kopi Di Kota Banda Aceh)*, Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol. 4. No. 2.Juli 2011 Hal. 202 – 215
- Suardika, I Made Sadha. 2007. *Audi Jurnal Akuntansi dan Bisnis Volume 2*. Denpasar : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Suryadi, 2006.*Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan, Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak*. Jurnal Keunagan Publik, 4 (1), 105-121
- Undang-undang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (UU KUP) nomor 28 tahun 2007.